

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**
(Studi Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembuatan Kerupuk Ikan Di Kecamatan
Sukamara Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah)
*Strategies of the Sukamara Regency Government in Empowering Community Economic
(Study about Empowerment of Fish Chips Small Businesses at the Sukamara Sub District,
Central Kalimantan).*

ISWAN GEMAYANA
Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik, PPSUB

Sukanto dan Ismani HP
Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FIAUB

ABSTRAK

Penelitian berawal dari latar belakang masalah tentang upaya oleh pemerintah kabupaten Sukamara dalam memberdayakan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara mengingat sampai saat ini, masih belum mampu menjadikan usaha kecil pembuat kerupuk ikan sebagai produk unggulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Potensi usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, (2) Strategi pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan (3) Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada pengusaha kecil pembuatan kerupuk di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah. Analisis yang dilakukan dengan mengikuti model Miles Huberman yaitu analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memberdayakan pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan telah dilakukan, namun belum bisa dilakukan secara maksimal mengingat Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai pemerintahan baru hasil pemekaran mengalami beberapa kendala diantaranya keterbatasan personil, alokasi anggaran masih terserap untuk pembuatan infrastruktur gedung-gedung perkantoran pemerintah dan penataan organisasi kedalam.

Beberapa rekomendasi dalam rangka melakukan strategi pemberdayaan pengusaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara: (1) Mengisi kekosongan jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara dengan pejabat-pejabat yang berkompeten dibidangnya, (2) Memberikan pinjaman berupa dana pinjaman bergulir tanpa bunga, pemberian pelatihan manajemen perusahaan dan strategi pemasaran kepada para pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan di Kabupaten Sukamara, (3) Mendorong terbentuknya kemitraan bapak angkat antara tiga perusahaan besar yang ada dengan para pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan dan memfasilitasi bagi keberadaan LSM dan Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah untuk menjadikan para pengusaha pembuat kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara sebagai wadah binaannya.

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi masyarakat, kerupuk ikan

ABSTRACT

This research begin with problems background about efforts by the Sukamara Regency Government in empowering fish chips making small businesses in Sukamara sub district, Sukamara regency recall to so far unable to make the small businesses as a superior product. This research was aimed at describing and analyzing: (1) small businesses potential at the Sukamara sub district of Sukamara regency (2) empowerment strategies for the small businesses at the Sukamara sub district, Sukamara regency (3) inhibiting and supporting factors in empowering the small businesses at the Sukamara sub district, Sukamara regency.

It is qualitative research with location at fish chips small entrepreneur at the Sukamara sub district, Sukamara Regency, Central Kalimantan province. The used analysis is Miles Huberman, it is interactive analysis. The Sukamara regency government is one of new government result from dividing of West Kotawaringin Regency that is divided into three governments, Sukamara Regency, Lamandau Regency and Kotawaringin Regency. Fish chips making has potential for development because the raw material potential, the availability of labors and open market opportunities.

The results showed that efforts done by the Sukamara Regency in empowering the small businesses, but can not be done as maximally because it is new government as division result, it has obstacles such as limited personnel, budget allocation that is absorbed into infrastructure making for governmental office building and internal improvement.

It can be recommended that some steps in empowering the small businesses at the Sukamara sub district, Sukamara regency are: (1) filling the vacant position in Industrial and Trade Agency of the Sukamara Regency with competent official, (2) giving non-interests loan in the form of grant, giving management and marketing strategy training to the small businesses at the Sukamara regency (3) encouraging the partnership among three existing company with the small businesses and facilitating the existence of the NGO and Institute for Higher Education at the Central Kalimantan to make the small business as their learners.

Keywords: empowerment, community economics, small business

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah di Indonesia telah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Mereka berada diseluruh pelosok bergerak dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi bersama pelaku ekonomi lainnya. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah, dunia usaha dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Administrasi publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dari peradapan manusia, karena administrasi publik mempunyai fungsi kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai macam energi sosial yang sering kali bertentangan satu sama lain dalam suatu organisme yang bulat padu, sehingga energi-energi tersebut

dapat bergerak sebagai kemampuan dari satu kesatuan.

Administrasi publik berkaitan erat dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sasaran kebijakan administrasi publik juga meliputi semua bidang dan semua aktivitas yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan sektor publik seperti salah satunya usaha kecil. Kebijakan desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2000, diharapkan akan lebih memberikan peluang pada perubahan kehidupan pemerintahan daerah yang demokratis untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hakekat demokratis adalah keterlibatan rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Disamping itu juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan mengelola segenap potensi daerah untuk kemajuan pembangunan bagi daerahnya dengan memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dengan otonomi daerah tersebut memungkinkan daerah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategi yang lebih tepat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi di daerah.

Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan tentang penyelenggaraan suatu pemerintahan (*state*) yang mensyaratkan pada upaya untuk bersama-sama melibatkan partisipasi segenap komponen masyarakat (*civil society*) dan swasta (*private sector*) guna menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep *good governance* menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam

bidang-bidang ekonomi, sosial, dan politik serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, swasta dan rakyat dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai sekarang tidak pelak lagi terkait langsung dengan sejumlah “salah atur” sehingga menggerogoti sistem perekonomian Indonesia. Kesalahan utama bersumber pada keengganan menata dengan jelas faktor-faktor produksi yang menentukan hajat hidup orang banyak seperti tanah, mineral dan hasil laut. Dalam kata lain penerjemahan Pasal 33 UUD 1945 tidak pernah dirumuskan dengan rinci, lengkap dan tuntas, bahkan pelaksanaannya lebih banyak ditentukan oleh tafsiran pihak yang sedang berkuasa akibatnya terjadi salah kaprah yang semakin lama semakin parah.

Dalam upaya agar lebih tahan banting, tatanan ekonomi Indonesia mesti diberi landasan yang kukuh, diantaranya dengan menciptakan ekonomi pasar yang sehat dan penghapusan monopoli. Maka untuk itu diupayakan usaha membangun masyarakat yang mengandung “relevansi emansipatoris” yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat, yang bukan saja memerangi kemiskinan dan kesenjangan, tetapi juga memungkinkan

masyarakat untuk menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan mandiri.

Pemihakan kepada golongan ekonomi lemah ini adalah dengan upaya peningkatan pada kemampuan lembaga usaha kecil untuk memperbesar akses mereka pada modal, pasar, sumber daya, infrastruktur dan produksi, karena kesemua itu penting bagi pengembangan kelembagaan yang memungkinkan golongan ekonomi lemah dapat berswadaya. Dengan demikian konteks pemberdayaan usaha kecil adalah peningkatan kemampuan kelembagaan usaha kecil agar dapat tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Paradigma ini muncul sebagai jawaban atau reaksi dari kegagalan pembangunan yang cenderung sentralistis, (Korten, 1988) Model tersebut memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Pemberdayaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi tangguh dan mandiri yang pada akhirnya menjadi pengusaha menengah. Diakui bahwa pemberdayaan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Usaha kecil adalah bentuk perekonomian rakyat yang apabila diberdayakan akan mampu memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan Indonesia seperti pengangguran, juga mampu membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, peran usaha kecil dalam menciptakan usaha yang tidak

menciptakan ketergantungan usaha-usaha besar dan menengah terhadap pasar luar negeri. Dengan kata lain, usaha yang berkesinambungan harus ditunjang dengan pasar lokal yang kuat. Berkembangnya usaha kecil yang banyak tersebar di daerah-daerah akan mampu menaikkan daya beli masyarakat yang merupakan pendukung potensial pasar dalam negeri.

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu pemerintahan baru yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi tiga Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Sedangkan Kabupaten Sukamara mempunyai 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai. Pembentukan Kabupaten Sukamara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, masyarakat Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara adalah masyarakat yang heterogen. Berbagai lapisan dan status masyarakat ada di kecamatan ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena adanya faktor yang mendukungnya, diantaranya karena usaha perkebunan dan usaha kayu. Yang paling menarik di Kecamatan ini adalah adanya sentra usaha kecil pembuatan kerupuk ikan. Pekerjaan ini ditekuni sebagai pekerjaan pokok atau sampingan dan menjadi sumber pendapatan utama atau pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produksi juga dikenal sebagai "Kerupuk Ikan Sukamara".

Usaha kecil pembuatan kerupuk ikan ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Kabupaten Sukamara dan sekitarnya, namun sudah terkenal di Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan sampai di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pembeli produk

tersebut dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sukamara dan sekitarnya serta pembeli dari luar Kabupaten Sukamara yang datang untuk belanja kerupuk ikan dan sejenisnya, baik itu untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk diperdagangkan.

Badai krisis ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan turunnya permintaan di beberapa bidang usaha. Sebagai sentra produksi pembuatan kerupuk ikan dengan berbagai macam bentuk produksinya, masyarakat Kecamatan Sukamara juga tidak lepas dari terpaan krisis ekonomi yang mengakibatkan biaya produksi meningkat, meningkatnya harga bahan baku, namun harga jual produk tidak meningkat. Pada awalnya terjadi penurunan produksi karena permintaan turun, tetapi beberapa lama terjadi peningkatan permintaan, yang secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan produksi kerupuk ikan tersebut.

Perkembangan kondisi dinamika pengusaha kecil kerupuk ikan ini disebabkan oleh antara lain dinamika dan mobilitas sosial masyarakat yang berupaya saling memberdayakan diri dalam sektor usaha kerupuk ikan. Melihat prospek yang cukup bagus di sektor usaha kerupuk ikan, anggota masyarakat yang semula sebagai pekerja pada salah satu usaha kerupuk ikan memberanikan diri untuk mendirikan sendiri usaha kerupuk ikan dengan modal pengalaman dan keterampilan serta tabungan yang dimilikinya. Kondisi intern masyarakat yang memang memiliki potensi untuk berkembang dengan adanya usaha yang dimiliki dan menguatkan hasrat untuk lebih berdaya mendorong masyarakat yang menggeluti usaha kecil kerupuk ikan untuk meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan ini di dalam perkembangannya juga turut didorong oleh pemerintah dan pihak swasta serta dan kondisi lingkungan. Pemerintah kabupaten maupun propinsi serta pusat berupaya dalam memberikan perhatian dalam pemberdayaan usaha kecil. Pemerintah

pusat melalui instansi-instansinya yang ada di propinsi maupun kabupaten seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sering melakukan pengawasan dan pembinaan, baik dari segi kelengkapan perijinan usaha maupun segi bantuan permodalan, produksi dan teknologi serta pemasaran. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah memberi kebebasan kepada masyarakat Kecamatan Sukamara dalam berusaha dan mengembangkan usahanya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan ijin usaha dan penyediaan fasilitas tempat usaha sebagai sentra usaha kerupuk ikan. Pemerintah memberikan peluang yang luas untuk berkembangnya usaha kecil kerupuk ikan. Kondisi ini didukung adanya kebijakan pembangunan masyarakat, misalnya gerakan cinta produk Indonesia, pengembangan produk unggulan daerah, dan berbagai kegiatan promosi. Dalam hal pemasaran, Pemerintah Kabupaten Sukamara selalu menyediakan stand-stand khusus untuk hasil usaha kerupuk ikan dalam setiap pameran pembangunan di daerah maupun di luar daerah.

Hal lain yang berperan dalam pemberdayaan usaha kecil kerupuk ikan adalah pihak swasta. Para pihak swasta baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pemberdayaan usaha kecil kerupuk ikan dengan bentuk kemitraan usaha dalam aspek permodalan dan pemasaran. Dilihat dari komponen yang terlibat dalam pengembangan usaha kecil kerupuk ikan, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal tentunya bisa diasumsikan bahwa pengusaha kecil kerupuk ikan ada yang sudah mapan dan maju serta berkembang. Memang ada yang sudah maju dan berkembang, namun ada juga yang masih belum maju dan berkembang atau istilah lainnya masih jalan di tempat (*stagnant*), yang sudah maju dan berkembang saja masih memerlukan pemberdayaan untuk bisa tetap tangguh dan mandiri serta bisa menanjak menjadi pengusaha menengah. Sedangkan yang *stagnant* masih

memerlukan pemberdayaan untuk bisa terus menjalankan usahanya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai : (1) Bagaimana Potensi Usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?; (2) Bagaimanakah Strategi pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?; (3) Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Potensi usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara; (2) Strategi pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara; (3) Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang ingin diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, karena peneliti akan mengumpulkan dan menganalisa bukti empirik (data) secara sistematis agar dapat memahami fenomena sosial yang tengah diteliti dengan maksud untuk menentukan, menjelaskan, dan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dalam rangka mengembangkan usahanya, khususnya bagi masyarakat yang berusaha di bidang pembuatan makanan ringan yakni usaha kecil pembuatan kerupuk ikan agar dapat

meningkatkan perekonomian dan keberdayaan dirinya.

Penelitian ini difokuskan pada proses deskripsi dari berbagai faktor yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat mengembangkan usaha serta terjaminnya keberlanjutan usaha, dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang.

Dari uraian di atas dan berdasarkan masalah penelitian serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian adalah :

- a. Potensi Usaha Kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara : aspek produktivitas, dan aspek permodalan,
- b. Strategi pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan dalam aspek: Pembangunan Prasarana Umum, Peningkatan Kemampuan Manajerial, Pemeliharaan Pelestarian Lingkungan.
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara: faktor penghambat dan faktor pendukung.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah *Informan*, Tempat dan peristiwa, Dokumen.

Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah. Dipilihnya Kecamatan Sukamara sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena keunikan yang dimilikinya, yaitu : "Usaha Kecil Pembuatan Kerupuk Ikan" ini cukup terkenal tidak hanya di Kabupaten Sukamara dan sekitarnya, namun sudah terkenal di Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan sampai di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Usaha Kecil Pembuatan Kerupuk Ikan di Kecamatan Sukamara

Usaha kecil pembuatan kerupuk di Kecamatan Sukamara dimulai sekitar tahun 1987-an oleh beberapa keluarga saja, salah satunya Bapak Said dan Ibu Siti Tawadudiah yang pada awalnya merupakan usaha sampingan, dimana pada waktu itu masih memproduksi kerupuk dalam jumlah relatif kecil. Untuk melaksanakan proses produksinya, usaha kerupuk ikan ini masih mempergunakan peralatan tradisional. Seiring dengan perjalanan waktu, dengan pangsa pasar yang relatif masih terbuka dan semakin meningkatnya permintaan kerupuk, beberapa masyarakat sekitarnya ikut membuat kerupuk ikan.

Berdasarkan kenyataan bahwa prospek usaha kerupuk ini semakin diminati oleh konsumen tidak saja oleh masyarakat Kecamatan Sukamara namun sudah dikenal dan diminati juga oleh masyarakat sekitar Kecamatan Sukamara bahkan sudah mulai dikenal juga oleh sebagian masyarakat Kotawaringin Barat, maka sekitar tahun 1990 Bapak Said, Ibu Siti Tawadudiah beserta beberapa orang pengusaha kerupuk ikan mendirikan Kelompok Pembuat Kerupuk Ikan (KPKI) "Sukma Jaya" dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang beserta pengurusnya.

a. Aspek Produktivitas

KPKI yang dibentuk oleh beberapa pengusaha kerupuk ikan bertujuan untuk menampung para pengusaha kerupuk dalam mengatasi berbagai macam masalah dan merupakan wadah organisasi bagi segenap pengusaha kerupuk di wilayah Kecamatan Sukamara yang semakin banyak. Para anggota KPKI yang berada di Kecamatan Sukamara ini senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan jumlah produksinya serta terus berusaha untuk memperbaiki kualitas produksinya dengan mencoba berbagai komposisi bahan baku untuk mendapatkan komposisi bumbu kerupuk ikan yang enak rasanya serta

mengembangkan usahanya dimaksud tidak saja memproduksi kerupuk ikan, namun dikembangkan dengan memproduksi kerupuk udang. Dimana usaha pengembangan produksi kerupuk ikan dan kerupuk udang diawali pada tahun 1991.

Keberadaan kelompok pembuat kerupuk ikan "Sukma Jaya" telah mendorong beberapa anggota masyarakat lain untuk ikut memproduksi kerupuk ikan, bahkan beberapa pengusaha yang dulunya membuat kerupuk ikan hanya sebagai usaha sampingan telah mengkhususkan untuk berusaha dan bergerak di bidang usaha pembuat kerupuk ikan.

Sampai dengan tahun 2004 KPKI telah mempunyai jumlah anggota sebanyak 55 orang yang tersebar dalam 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Padang. Dari jumlah 55 pengusaha pembuat kerupuk ikan tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak \pm 275 orang dengan rata-rata per usaha melibatkan 5 orang. Beberapa pengusaha pembuat kerupuk ikan telah menunjukkan kemajuannya baik dalam keragaman produk yang dihasilkan maupun jumlah produksinya. Mereka itu antara lain Bapak Said dan Ibu Siti Tawadudiah yang telah mempunyai tenaga kerja sebanyak masing-masing 15 orang dan 11 orang. Dengan keragaman produk masing-masing 6 jenis dan 4 jenis.

Bahan dasar pembuatan kerupuk ikan terdiri dari tepung dan ikan. Tepung bisa didapat dipasaran, namun bahan ikan diperoleh dari pencari ikan yang ada di sungai yang berada di Kecamatan Sukamara Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Padang yang bernama sungai Jelai. Sebagian masyarakat Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Padang bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapan ikan tersebut ada yang dijual langsung ke pengusaha pembuat kerupuk ikan yang langsung datang ke lokasi nelayan dan terkadang dibeli oleh tengkulak atau dijual ke masyarakat umum sebagai lauk.

Beberapa pengusaha pembuat kerupuk ikan terkadang menghadapi ke-

terlambatan bahan baku yang disebabkan oleh kondisi sungai yang meluap di waktu musim hujan sampai terjadi banjir. Juga oleh kurangnya debit air yang ada di sungai Jelai sehingga hasil tangkapan ikan relatif sedikit.

Bahan baku kerupuk ikan berupa Ikan yang ditangkap di Sungai Jelai, juga didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Jelai (Kecamatan yang wilayahnya terletak disepanjang pantai laut) yang bekerja sebagai nelayan di laut Jawa. Selain bahan baku ikan diperlukan juga bahan baku tepung yang sangat besar. Tepung bahan dasar pembuatan kerepek ikan ini bisa didapat dari pasar di Kecamatan Sukamara. Tepung tersebut dipasok oleh pedagang dari Pulau Jawa dengan menggunakan kapal dagang dengan ukuran yang relatif kecil. Pada waktu-waktu tertentu misalnya pada bulan desember dimana gelombang laut cukup besar, kapal-kapal dagang akan menghentikan sementara kegiatannya menunggu laut teduh, hal ini akan mengakibatkan stok tepung di pasar kekosongan dan terjadinya ketidakstabilan harga tepung.

Pemasaran untuk industri kecil kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara pada saat pertama kali berdiri mempunyai daerah pemasaran terbatas pada lingkup pasar di Kecamatan Sukamara saja. Dengan bertambahnya kapasitas produksi yang didukung adanya kegiatan promosi, industri kecil kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara ini mampu memperluas daerah pemasarannya. Hingga saat ini usaha industri kecil kerupuk ikan selain memiliki daerah pemasaran di wilayah Kabupaten Sukamara juga telah mempunyai daerah pemasaran lainnya meliputi wilayah kota-kota di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Banjarmasin, dan Semarang. Prosentase volume penjualan ke daerah pemasaran yang paling besar adalah Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 55% yang disusul dengan daerah pemasaran Kalbar (15%), Kalimantan Selatan (17,5%), Semarang (7,5%) dan daerah pemasaran lainnya mencapai 5% pada tahun 2003.

Kebijakan besarnya harga jual produk kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara ditentukan dengan memperhatikan biaya produksi yang meliputi : harga bahan baku, biaya proses produksi dan keuntungan yang didasarkan pada perhitungan *break event point* per unit barang ditambah dengan prosentase yang diharapkan. Dalam menjalankan usahanya, industri kecil kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara tidak dapat menghindari adanya persaingan-persaingan dengan perusahaan yang sejenis, baik pesaing-pesaing dari perusahaan kerupuk di wilayah Kalteng sendiri maupun dari luar daerah Kabupaten Sukamara.

Adapun perusahaan kerupuk ikan yang menjadi pesaing bagi usaha industri kecil kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara ini, antara lain :

1. Kerupuk Ikan Pipih (Kuala Pembuang-Kalteng)
2. Kerupuk Ikan Finna (Sidoarjo).
3. Kerupuk Ikan Sekar Group (Kalsel).
4. Kerupuk Ikan Dorang (Kalbar).
5. Kerupuk Ikan Kopti (Kaltim).
6. Kerupuk lain yang sejenis dan lain-lain.

Persaingan yang terjadi pada produk kerupuk ikan pada umumnya pada kualitas, rasa, bentuk, ukuran dan harga termasuk didalamnya cara pengemasannya. Pesaing yang dirasakan cukup berat yang dirasakan industri kecil kerupuk ikan, adalah perusahaan kerupuk ikan “Finna” dan “Sekar Group”, karena mereka sebagai *leader* yang mempunyai rasa dan kualitas unggul. Oleh karena itu, industri kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara berusaha untuk memberikan rasa, warna, bentuk, ukuran yang sama dengan perusahaan pesaingnya dan memberikan harga yang lebih rendah serta kualitas yang sepadan agar dapat bersaing di pasaran.

b. Aspek Permodalan

Kondisi permodalan para pengusaha kerupuk ikan di wilayah Kecamatan sukamara yang tergabung dalam Kelompok Pembuat Kerupuk Ikan (KPKI) “Sukma Jaya” yang berjumlah 55 anggota

ditambah pengurusnya mempunyai variasi yang berbeda ada yang relatif sudah mapan ada juga yang bermodalkan sangat kecil. Kondisi sebagian besar anggota KPKI “Sukma Jaya” yang mempunyai aset usaha dan omset usaha yang relatif kecil pengurus KPKI “Sukma Jaya” telah berusaha untuk mengajukan pinjaman ke Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2004 untuk minta tambahan pinjaman dana bergulir tanpa bunga yang sebelumnya telah digulirkan pada tahun 1996 oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebelum dimekarkan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah). Namun permohonan tambahan pinjaman dana bergulir tersebut belum bisa terealisasi.

Beberapa dampak dari pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap daerah yang dimekarkan termasuk di dalamnya Kabupaten Sukamara berimplikasi pada penataan organisasi ke dalam yang tentunya menyerap banyak waktu, tenaga dan dana APBD Kabupaten Sukamara. Sedangkan dari pinjaman pihak perusahaan yang berada di Kecamatan Sukamara diberikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit “Sungai Rangit” yang memberikan pinjaman kepada Bapak Said sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun bersifat pribadi yang digunakan untuk mengembangkan usaha pembuatan kerupuk dengan omset penjualannya yang mencapai 7 – 8 juta/bulan dengan bunga lunak sebesar 10%/pa.

Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil

a. Pembangunan Prasarana Umum

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan bagi kemajuan dan mobilitas perekonomian di suatu daerah sangatlah penting terutama akses jalan yang menuju daerah kota, pasar, dan desa yang potensial bagi proses produksi baik dalam bidang produksi pertanian, produksi perkebunan, maupun bagi daerah industri kecil rumah

tingga dan badan usaha. Berkaitan dengan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Sukamara, ada beberapa kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan jalur lalu lintas antar daerah yang mengalami beberapa kerusakan. Beberapa ruas jalan yang rusak, terjadi di daerah sepanjang 20 Km yang menghubungkan antara Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Lamandau. Sedangkan prasarana pasar di Kecamatan Sukamara oleh pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2004 ini masih dalam proses pembangunan dan diharapkan pada pertengahan 2005, pasar yang merupakan pasar induk Kabupaten Sukamara selesai tepat waktu dan dapat membantu untuk memasarkan beberapa produk usaha termasuk industri kecil pembuatan kerupuk ikan. Guna menjual dan meluaskan pemasaran kerupuk dari produksi anggota KPKI pihak pemerintah Kabupaten Sukamara dalam segala event seperti Hari Jadi Kabupaten, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari-hari besar tertentu lainnya mengadakan stand pameran produk daerah.

b. Peningkatan Kemampuan Manajerial

Kwalitas dan produk kerupuk ikan sangat terkait dengan proses pemilihan bahan baku, dengan bahan baku yang baik dengan harga pembelian yang murah dan tersedianya selalu stok dipasaran untuk pembuatan kerupuk ikan. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan pengusaha pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara. Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara telah mengadakan kegiatan penyuluhan lapangan ke para pembuat kerupuk ikan melalui wadah organisasi KPKI “Sukma Jaya” guna meningkatkan kwalitas pemilihan bahan baku

Berkaitan dengan naik turunnya harga bahan baku baik bahan baku tepung tapioka ataupun bahan baku ikan berdasarkan penjelasan dari Bapak Soewanto telah disarankan untuk mengusahakannya sendiri melalui wadah Kelompok Pembuat

Kerupuk Ikan “Sukma Jaya” yang membeli dari agen dalam jumlah yang cukup bagi proses produksi seluruh anggota KPKI “Sukma Jaya” dalam waktu 30 hari. Dan bahan baku ikan memang terjadi beberapa kendala karena selama ini stok bahan baku ikan masih sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan dari alam yaitu sungai di Kecamatan Sukamara. Namun guna merealisasikan pembelian tepung yang dilakukan oleh KPKI “Maju Jaya” ada kendala soal dana yang sangat terbatas.

Sisi lain penyediaan bahan baku pembuatan kerupuk ikan dari bahan baku ikan selama ini masih disediakan dan dikelola secara tradisional dimana masyarakat desa tetangga mendapatkannya langsung dari alam sebagai mata pencaharian sampingan.

Kesemua pengusaha pembuat ikan di Kecamatan Sukamarta pada dasarnya telah mendapatkan penyuluhan tentang peningkatan produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara

Proses pengemasan yang selama ini dilakukan dengan memakai teknologi hanya oleh pengusaha yang mempunyai omset penjualan diatas Rp. 5.000.000,- yaitu pengusaha Bapak Said dan Ibu Siti Tawadudiah. Mereka sudah memberikan sablon merk pada kemasan plastiknya dan mengepres plastik dengan alat pres plastik sehingga terlihat lebih rapi. Disamping itu juga produk kerupuk ikan di Bapak Said dan Ibu Siti Tawadudiah telah dimintakan ijin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Sukamara.

Sedang pengusaha yang lain seperti Ibu Indarwati dan Bapak Hadi telah juga mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Sukamara namun pengemasan produk masih dilakukan sederhana sama seperti pengusaha kerupuk ikan yang lainnya yaitu dengan memberikan nama produk yang dihasilkan dengan memberikan label foto copy selebar kertas kecil yang dimasukkan pada kemasan, selanjutnya kemasan yang ada disulut dengan api kecil supaya bisa menyatu.

Bertitik tolak dari arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukamara tersebut, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya para pengusaha kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara telah dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat di Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Padang. Dimana pengembangan usaha kerupuk di dua kelurahan di Kecamatan Sukamara telah menyerap tenaga kerja.

Selain itu pemerintah Kabupaten Sukamara juga memberikan penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya memproduksi kerupuk ikan yang beraneka ragam dan mengikutsertakan pada even-even tertentu, pameran expo baik tingkat kabupaten maupun antar propinsi seperti yang baru saja dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2004 mengikuti pameran produk-produk usaha kecil yang dilaksanakan di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dengan mengikuti pameran produk-produk kerupuk ikan diharapkan akan menjadi semangat dan inspirasi guna membuat produksi kerupuk dengan aneka rasa, bentuk dan kemasan yang lebih inovatif.

Program Bapak Angkat di lokasi usaha kecil membuat kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun dari pengamatan peneliti di lapangan sebenarnya ada satu perusahaan perkebunan kelapa sawit Sungai Rangit yang memberikan pinjaman kepada pengusaha kerupuk ikan yang bernama Bapak Said, namun pinjaman yang diberikan itu sifatnya pribadi bukan untuk organisasi KPKI.

c. Pemeliharaan Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan alam sangat penting artinya bagi kelangsungan keseimbangan lingkungan hidup. Perusakan alam oleh sekelompok orang tentu akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Sungai Jelai yang terdapat di Kecamatan Sukamara merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi kelangsungan pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara mengingat bahan baku ikan di dapat dari nelayan yang

mencari ikan di sungai Jelai. Berkaitan dengan upaya pelestarian alam, pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Kantor Camat Sukamara telah berupaya melestarikan dan menjaga keberadaan sungai Jelai dari perusakan oleh manusia yaitu dengan memasang papan-papan larangan mencari ikan dengan menggunakan alat strum atau racun ikan

Penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sukamara juga mempunyai andil terhadap hasil tangkapan ikan oleh nelayan bila musim kemarau tiba. Volume air di sungai Jelai menurun drastis, namun bila musim hujan tiba sering terjadi luapan air yang disertai dengan banjir. Penebangan hutan terjadi hampir di seluruh Kecamatan Sukamara oleh masyarakat di Kecamatan Sukamara sendiri. Mereka menebang pohon umumnya masyarakat yang miskin yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga kasar.

Masalah ilegal logging merupakan masalah yang sulit diatasi mengingat perusakan tersebut tak saja dilakukan oleh masyarakat miskin namun juga oleh pengusaha kayu dengan berpuluh-puluh anak buahnya, dengan menggunakan gaji mesin. Penindakan terhadap perusak hutan juga sulit dilakukan mengingat para pengusaha kayu ilegal melakukan upaya suap terhadap petugas keamanan yang ada

Bahan baku ikan kecuali ditangkap langsung dari sungai juga bisa diusahakan dengan budidaya ikan dalam keramba, seperti yang dilakukan oleh beberapa petani ikan di sekitar sungai Jelai yang mendapatkan binaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Budidaya ikan dalam keramba dalam jumlah yang cukup juga akan bisa menjamin stok bahan baku pembuatan kerupuk ikan dan harga bahan baku ikan yang sering mengalami kenaikan yang tajam mengingat terbatasnya hasil tangkapan ikan di sungai Jelai. Demikian penjelasan lanjutan oleh Bapak Kasum Kinsi.

Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat bagi kemajuan usaha pembuatan kerupuk ikan dibagi dalam 2 kelompok yaitu : Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan manajerial pengusaha industri kecil kerupuk ikan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, terbatasnya modal kerja dan rendahnya etos kerja dari pengusaha kerupuk. Data tentang tingkat pendidikan dan pengusaha yang telah memperoleh ketrampilan khusus pembuatan kerupuk ikan dengan waktu lebih dari 24 jam didominasi pengusaha kerupuk ikan tidak tamat SD sampai tamat SD yaitu sejumlah 34 orang atau 61%, selanjutnya tamat SMP sebanyak 15 orang atau 27%, selanjutnya tamat SMA sebanyak 5 orang atau 9% dan pendidikan D1 – D4 sebanyak 1 orang atau 2% dari jumlah 55 orang pengusaha kerupuk ikan. Sedang keterampilan yang dimiliki oleh pengusaha dengan mendapatkan pelatihan di atas 24 jam dari data belum ada yang memperoleh pelatihan khusus.

Faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti beberapa pengurus dari kelompok pembuat kerupuk ikan yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan seluruh anggota kelompok, faktor yang kedua adalah belum terjadi sistem Bapak Angkat terutama 3 perusahaan besar terdiri dari 2 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan satu perusahaan Penggergajian Kayu, yang ketiga adalah pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan pemerintah baru hasil pemekaran dari Kabupatenwaringin Barat sehingga perhatian ke usaha kecil pembuatan kerupuk belum sepenuhnya dapat dicurahkan.

b. Faktor Pendukung

Dengan era otonomi daerah merupakan modal yang sangat kuat dan harapan yang lebih besar bagi suatu daerah guna

mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada dalam suatu daerah, disamping itu juga dapat digali potensi yang terpendam guna dikelola secara maksimal untuk kepentingan masyarakat daerah itu.

Sehubungan dengan pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara ada beberapa faktor pendukung bagi kemajuan usaha pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan, hal ini berkaitan dengan masih tersedianya jumlah tenaga kerja yang ada diwilayan Kecamatan Sukamara, tersedianya dalam jumlah yang cukup bahan baku ikan dan masih tingginya permintaan pasar akan kerupuk ikan.

Faktor lain yang menjadi pendukung adalah dengan semakin ketatnya kasus *illegal logging*, maka banyak pula masyarakat yang berpotensi mengalihkan usahanya ke sektor lain. Untuk wilayah Kecamatan Sukamara usaha kecil pembuatan kerupuk ikan salah satunya.

Pembahasan Umum

1. Potensi Usaha Kecil Pembuatan Kerupuk Ikan di Kecamatan Sukamara

Suatu rangkaian kegiatan usaha tentunya harus memperhitungkan terlebih dahulu kemampuan / potensi yang ada, guna dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin guna bermanfaat bagi usahanya.

Usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara mempunyai potensi untuk dikembangkan hal ini terkait dengan ketersediaan bahan baku ikan yang didapat dari sungai Jelai dan Laut Jawa. Beberapa potensi lagi bahwa tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup guna menggerakkan segenap komponen di wilayah Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Padang untuk menjadikan suatu daerah pusat industri kecil pembuatan kerupuk ikan.

Namun potensi yang ada itu rupanya terkendala oleh kurangnya kemampuan para pengusaha industri kecil dalam aspek pendanaan guna membantu pengusaha kecil tersebut mengembangkan usahanya baik untuk proses produksi, yang dimulai dengan proses pemilihan bahan baku sampai dengan kegiatan pemasaran produksi kerupuk ikan juga dipakai untuk mengembangkan guna menambah kapasitas jumlah produksi kerupuk ikan.

Guna mempertajam analisis pembahasan berkaitan dengan potensi usaha kecil kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara, berikut akan kami bahas dari "Perspektif teoritis, Aturan formal"

Dari sudut pandang teori : salah satu pendapat dinyatakan oleh Kartasmita (1996) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat yang lemah;
- b. Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan;
- c. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperative*) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal;
- d. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, di sini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju, dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, perguruan tinggi dan sebagainya.

Penerapan kebijakan pemberdayaan dengan menciptakan suasana pengembangan kegiatan usaha bersama (*co-operative*) telah terjadi dengan terbentuknya Kelompok Pembuatan Kerupuk Ikan Sukma Jaya yang dibentuk pada tahun 1990. Namun upaya penyuluhan dan pembinaan belum bisa dilakukan hal ini

terlihat tidak ada anggota yang mengikuti pelatihan teknis produksi pembuatan kerupuk ikan yang efektif dan efisien dengan teknologi yang terjangkau.

Sedang untuk upaya pemerintah sebagai fasilitasi guna melibatkan partisipasi dari pihak swasta, organisasi LSM juga Perguruan Tinggi belum dilakukan dengan baik.

Kecamatan Sukamara yang di wilayahnya terdapat 3 perusahaan besar yang terdiri dari 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 1 perusahaan penggergajian kayu berpotensi untuk ikut berpartisipasi guna kemajuan bagi organisasi KPKI baik itu melalui : Dana Kemitraan (Bapak Angkat), Dana Bergulir ataupun Dana Pinjaman dari BUMD / BUMN dengan bunga rendah.

Pinjaman dana bergulir dari pemerintah juga relatif kecil yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- bagi 55 pengusaha kecil kerupuk ikan. Sedang ajuan tambahan dana sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan ke pemerintah belum dapat cair mengingat belum dialokasikan dalam APBD 2004.

Pelibatan unsur LSM dan Perguruan Tinggi sebagai komponen yang berpotensi guna melibatkan pembinaan juga belum dilakukan di wilayah Kecamatan Sukamara. Dari sudut aturan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukamara: Pemerintah Kabupaten Sukamara secara aturan telah merencanakan penanganan usaha kecil dengan dikeluarkannya Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sukamara namun dalam implementasinya Perda belum dapat berfungsi dengan maksimal mengingat jabatan penting bagi usaha kecil sampai dengan saat ini masih belum terisi diantaranya Kepala Bidang Industri Kecil Perdagangan dan Koperasi Seksi Industri Aneka Kecil dan Menengah, Seksi Sarana dan Prasarana Industri sehingga penanganan industri kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum maksimal dilakukan.

2. Pemberdayaan Usaha Kecil

Beberapa upaya guna memberdayakan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukamara diantaranya dengan dilakukannya penyuluhan-penyuluhan langsung ke pengusaha pembuatan kerupuk ikan melalui Organisasi Kelompok Pembuat Kerupuk Ikan (KPKI) Sukma Jaya guna bisa meningkatkan kualitas dan kwantitas produksi kerupuk ikan serta strategi pemasaran diantaranya dengan mengikutsertakan dalam berbagai event Pekan Produksi Usaha Kecil baik Tingkat Kabupaten ataupun Tingkat Propinsi.

Guna membuat penajaman pembahasan tentang strategi pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah Kabupaten Sukamara berikut akan dilihat dari "Perspektif/sudut pandang teoritis", "Aturan kebijakan pemerintah Kabupaten". Dilihat dari sudut pandang teoritis : salah satu pendapat disampaikan oleh Kartasasmita (1995), mengemukakan Pemerintah dalam hal ini sebagai "agen perubahan" dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan 3 (tiga) arah tujuan, yaitu:

- a. *Enabling*, maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. *Empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan.
- c. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Penciptaan *enabling*, dengan sasaran penciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang belum dilakukan secara maksimal hal ini terlihat dengan masih lemahnya kondisi keuangan rata-rata pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, pemberian

pelatihan teknis juga belum pernah dilakukan guna mengenalkan dan mensosialisasikan berbagai macam teknologi tepat guna berupa pemberian alat rajang / potong kerupuk ikan sebanyak 2 buah dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada pengusaha yang lain memakai alat tersebut, namun ternyata alat rajang tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak mendapatkan penanganan perbaikan pemakaian teknologi tersebut untuk pembuatan kerupuk ikan.

Menciptakan empowering yang bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan.

Keberadaan prasarana rakyat sangat menunjang kelancaran proses perekonomian di wilayah sukamara, dan pada tahun ini di wilayah Kecamatan Sukamara sedang dibangun prasarana pasar berupa pembangunan pasar induk pemerintah Kabupaten Sukamara yang diharapkan tentunya ikut mendorong pemasaran produksi kerupuk ikan.

Namun kondisi prasarana jalan yang menuju Kabupaten Lamandau ternyata dalam kondisi yang rusak dengan aspal yang berlobang hal ini tentunya punya pengaruh untuk kelancaran transportasi. Sedangkan upaya protecting ditujukan untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat luas. Kondisi pengusaha kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara yang tergabung dalam organisasi KPKI Sukma Jaya terbanyak dari kalangan yang mempunyai kemampuan baik dana maupun manajerial yang lebih untuk peran pemerintah Kabupaten Sukamara diperlukan guna melindungi dan mengembangkan produksi kerupuk ikan guna kelangsungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kecamatan Sukamara.

Bentuk perlindungan dari pemerintah kiranya dapat dilakukan dengan berperan lebih besar baik dalam penyuluhan dan pembinaan produksi kerupuk ikan, pengenalan dan pemakaian teknologi tepat

guna, pemberian pinjaman khusus berupa dana pinjaman bergulir tanpa bunga yang lebih besar nilainya dan mendorong dan menciptakan pengurusan perijinan baik berupa ijin usaha ataupun ijin dari Dinas Kesehatan bagi makanan ringan juga memfasilitasi secara aktif program Bapak angkat dengan perusahaan besar yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara. Upaya yang lain juga perlu untuk berkoordinasi dengan Dinas Perikanan guna pengembangan budidaya ikan dalam keramba dan hal yang sangat penting adalah mendorong pihak keamanan untuk menertibkan kasus illegal logging, mengingat dampak penebangan hutan yang berakibat pada penggundulan hutan mempunyai potensi banjir dan kekeringan.

Dilihat dari sudut pandang Aturan: Keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara terhadap pengembangan perekonomian masyarakat yang berskala usaha kecil sangat besar, keinginan tersebut dapat dilihat pada arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sukamara yang tertuang dalam Poldas tahun 2003.

Merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyusun pedoman pelaksanaannya yang tertuang di dalam Renstra Kabupaten Sukamara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukamara sebagai sebuah Kabupaten yang baru dibentuk sudah seharusnya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang dicerminkan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara tertib maka perlu segera dibentuk kelembagaan, penataan aparatur daerah baik kuantitas maupun kualitas, penyediaan pembiayaan dan penyiapan peraturan daerah serta penyiapan sarana dan prasarana kerja pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini, pemerintah Kabupaten Sukamara masih belum dapat berkonsentrasi pada pengembangan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan, hal ini terlihat masih belum dapat berjalan secara

maximal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara yang hanya dijabat oleh 4 orang dengan 6 orang stafnya. Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran masih berkonsentrasi pada penataan organisasi dan pembangunan infrastruktur bangunan gedung-gedung atau fasilitas perkantoran. Pemerintah Kabupaten Sukamara juga belum mengeluarkan kebijakan yang lebih terfokus berupa SK. Bupati yang mengarah langsung pada pengembangan produksi pembuatan kerupuk ikan. Guna melindungi kelestarian hutan dan ekosistem laut yang berhubungan dengan kelangsungan penyediaan bahan baku ikan, pemerintah Kabupaten Sukamara perlu mengeluarkan aturan pelarangan perusakan hutan dan ekosistem laut guna mendukung perundangan yang telah ada.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dibedakan dalam dua kategori yaitu :

- a. Faktor internal : yaitu faktor yang disebabkan oleh komponen-komponen penghambat dari dalam yang meliputi rendahnya kemampuan managerial para pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang masih rendah, terbatasnya modal kerja dan rendahnya semangat kerja.
- b. Faktor eksternal : yaitu faktor yang disebabkan oleh komponen-komponen penghambat dari luar seperti adanya perilaku pengurus KPKI Sukma Jaya yang cenderung egois, perhatian pemerintah yang belum maksimal, belum adanya peran partisipasi dari LSM, swasta dan perguruan tinggi guna ikut secara langsung memberdayakan pengusaha kecil.

Sedang faktor pendukung dalam proses pemberdayaan usaha kecil pembuat kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara disamping tersedianya bahan baku ikan

dan jumlah tenaga kerja yang cukup, dengan adanya pemekaran Kabupaten Sukamara maka semangat otonomi daerah proses pemberdayaan usaha kecil di lingkungan Kecamatan Sukamara kedepan akan semakin mendapat perhatian yang lebih besar untuk peningkatan kemajuan pembuatan kerupuk ikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti pada bab sebelumnya, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Usaha Kecil Pembuatan Kerupuk Ikan

Potensi usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara mempunyai peluang untuk dikembangkan, hal ini disebabkan oleh tersedianya bahan baku ikan, jumlah tenaga kerja yang cukup namun pengelolaannya selama ini masih dilakukan dengan proses produksi yang masih tradisional belum memakai teknologi tepat guna. Dilihat dari kemampuan permodalan para pengusaha pembuat kerupuk ikan juga relatif pengusaha kecil yang bermodalan terbatas. Program Bapak Angkat kepada 3 pengusaha besar yang ada di Kecamatan Sukamara juga belum dilakukan hal yang sama juga tidak melibatkan pihak LSM dan Perguruan Tinggi guna melakukan langkah pembinaan.

2. Pemberdayaan Usaha Kecil

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan sudah direncanakan dalam Poldas tahun 2003 dan Renstra Kabupaten Sukamara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, namun dalam implementasinya upaya untuk menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, menyediakan

prasarana dan sarana yang diperlukan serta melindungi kepentingan masyarakat lemah belum sepenuhnya dapat dijangkau mengingat jumlah pegawai yang menjabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara masih banyak yang kosong. Sehingga upaya untuk memberdayakan pengusaha pembuat kerupuk ikan belum dilakukan secara maksimal.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor penghambat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

- a. Faktor internal : yang meliputi rendahnya kemampuan managerial para pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang masih rendah, terbatasnya modal kerja dan rendahnya semangat kerja.
- b. Faktor eksternal : adanya perilaku pengurus yang cenderung egois, perhatian pemerintah yang belum maksimal, belum adanya peran partisipasi dari LSM, swasta dan perguruan tinggi guna ikut secara langsung memberdayakan pengusaha kecil.

Sedang faktor pendukung dalam proses pemberdayaan usaha kecil pembuat kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara di samping tersedianya bahan baku ikan dan jumlah tenaga kerja yang cukup juga dengan adanya pemekaran kabupaten maka dengan semangat otonomi pemberdayaan usaha kecil di lingkungan Kecamatan Sukamara kedepan akan semakin mendapat perhatian yang lebih besar untuk peningkatan kemajuan pembuatan kerupuk ikan.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran:

1. Guna mempercepat proses pemberdayaan pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan, maka pemerintah perlu untuk memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Bapak Angkat antara 3 perusahaan besar yang ada di Kecamatan Sukamara dengan

para pengusaha kecil pembuat kerupuk ikan yang tergabung dalam organisasi KPKI Sukma Jaya.

Sementara itu juga perencanaan untuk difasilitasi bagi LSM dan Perguruan Tinggi untuk menjadikan usaha kecil pembuatan kerupuk ikan sebagai wadah Pembinaannya.

2. Kosongnya jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukamara perlu untuk segera diisi dengan tujuan program pemberdayaan pada usaha kecil pembuatan kerupuk ikan di Kecamatan Sukamara akan dapat dijalankan dengan maksimal dan perlu untuk dibuatkan kebijaksanaan peraturan larangan penebangan hutan dan perusakan keseimbangan ekosistem laut yang akan sangat mempengaruhi keberadaan ikan. Aturan larangan tersebut diperlukan guna mendukung perundangan yang telah ada.

3. Perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih terfokus guna meningkatkan ketrampilan pembuatan kerupuk ikan, pemberian dana pinjaman bergulir tanpa bunga kepada pengusaha kecil pembuatan kerupuk ikan, pelatihan manajemen perusahaan, strategi pemasaran dan mendorong bagi pihak lain seperti LSM dan Perguruan Tinggi untuk menjadikan usaha pembuatan kerupuk tersebut sebagai wilayah binaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Richard D, and George J. Petrello. 1978. *Introduction To Business An Integration Approach*, Glencoe Press, Beverly Hills
- Bryant, Corralie dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Budiman, A. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cook, Sarah dan Steve, Macaulay. 1997. *Pemberdayaan Yang Tepat*, PT. Elex Media, Komputindo, Jakarta.

- Ebert, Ronald J, Griffin, Ricky W. 2000. *Business Essentials*, Prentice Hall, Upper Saddle, New Jersey, 07458.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 02142 USA.
- Goulet, D. 1973, *The Cruel Choice: A new Concept in the Theory of Development*. Atheneum, New York.
- Holme, D. dan M. Turner. 1990. *Sociology of Development Theories, Politics and practice*, Harvester Wheatsheaf Hert Fordshire.
- Hughes, Robert J, Jack R. Kapoor, 1985, *Business*, Houhton Mifflin Coy.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Universitas Negeri Malang-FIA, Malang.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pembangunan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada FIA Unibraw, Malang*.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Korten, D.C. dan Sjahrir (ed). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan strategi*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Moeljarto, T. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mubyarto, T. 1992. *Perekonomian Rakyat Kalimantan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Nawawi H. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pranarka, A.M.W. dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta..
- Sarman, M dan Sayogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia*, Puspa Swara, Jakarta.
- Schumacher. 1973. *Small is Beautiful, Blond and Briggs*, London, England.
- Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan strategi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sopian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sjifudian, Hetifah, Dedy Haryadi, Maspiyati. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, AKATIGA, Bandung.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Memberdayakan Rakyat dalam Pembangunan Indonesia, dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat (Anggito Abimayu, dkk)*, PAU-SE UGM bersama BPFE UGM, Yogyakarta.
- Sukarto Reksodiprodjo dan A.R. Karseno. 2001. *Ekonomi Perkotaan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moelyarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, PT. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.